

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepada profit yang sering juga disebut sebagai organisasi bisnis. Organisasi nirlaba dalam menjalankan kegiatannya tidak semata-mata di pengaruhi oleh profit (biasanya menggunakan istilah selisih lebih) dan jika hal tersebut terjadi selisih lebih tersebut akan digunakan untuk *stakeholder* atau kepentingan publik.

Di dalam organisasi nirlaba kepemilikan tidak seperti pada kepemilikan pada organisasi bisnis, artinya bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual dialihkan, atau ditebus kembali dan dana sumber daya organisasi nirlaba biasanya berasal dari sumbangan para donatur tanpa mengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan, walaupun donatur tidak mengharapkan adanya pengembalian atas sumbangan mereka, mereka tetap menginginkan pelaporan, dan pertanggung jawaban atas dana yang mereka berikan. Para donatur ingin tahu bagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk kepentingan publik buka untuk di gelapkan. (Mesakh, 2012)

Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai :

- a. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut
- b. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. (IAI, 2010).

Akhir-akhir ini sering kita mendengar isi-isu Lembaga Swadaya Masyarakat (*LSM/Non Government Organization*) digunakan sebagai kedok bagi sejumlah orang untuk meraup keuntungan pribadi. Faktanya sampai saat ini masih terdapat yang menerima amplop atau kotak di bus umum yang mengatas namakan panti asuhan tertentu namun setelah ditelusuri keberadaan panti tersebut tidak jelas, hal tersebut merupakan salah satu contohnya. Berdasarkan berita yang dilansir pada bulan September 2011, kasus Panti Sosial Tresna Wedha di Parepare Sulawesi dan menjadi *headline* di berbagai media selama lebih dari tiga hari. Betapa mirisnya para penghuni disugahi makanan basi oleh pengelola panti. Tak cukup sampai disitu dikabarkan pula bahwa tempat huni yang tidak layak tinggal bahkan redaksi yang mengabarkan mengatakan lebih nyaman di penjara daripada di panti sosial tersebut yang notabane nya adalah organisasi nirlaba. Atas beberapa kasus dan ilustrasi yang telah disebutkan di atas dirasa perlu dan hal tersebut merupakan suatu alasan mengapa laporan keuangan menjadi penting.

Menyusun laporan keuangan memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan apalagi memang untuk diterapkan pada organisasi nirlaba yang mempunyai *scope* yang kecil dan biasanya sumber dayanya kurang. Hal tersebut bukan menjadi alasan karena organisasi nirlaba dapat membuat laporan keuangan sederhana tanpa harus mengacu kepada standar pelaporan keuangan entitas nirlaba

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45). Harapannya dengan melakukan penyusunan laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi kepada regulator, donatur dan pertanggungjawaban kepada publik.

Beberapa organisasi nirlaba telah mampu menerapkan PSAK 45 baik *full* mengacu pada PSAK 45 atau yang tidak hanya mengacu kepada PSAK 45 saja, beberapa organisasi nirlaba menggunakan pedoman tambahan hal ini mengingat organisasi nirlaba mempunyai karakteristik sendiri seperti Keuskupan Agung Semarang yang mempunyai Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Paroki, Partai Politik dan Rumah Sakit yang juga mempunya pedoman tersendiri juga. Terdapat pula beberapa organisasi nirlaba yang telah menjalankan fungsi auditor independen dan menggunakan basis akrual dan mereka mem-*publish* laporan tersebut kedalam *web* masing-masing. (Hendrawan, 2011)

**Tabel 1.1**  
**Masalah Dalam Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Yayasan**

Media Bonafide Dan Waktu	Nama Pakar & Jabatan	Judul / Sub Judul	Hasil Liputan/ Tulisan/ Pernyataan
Serang, Snel Selasa 16 Juni 2015	M Suhardy, Kajati Banten	Ketua Yayasan LSM Ditahan	Kajati Banten, M Suhardy menyampaikan pihaknya tengah menyidik kasus dugaan Korupsi Hibah Pemprov Banten 2013. Ia menjelaskan Kejati Banten sudah mengantongi seorang tersangka dari kalangan LSM di Provinsi Banten yang terduga memanipulasi laporan keuangan yayasan.

Media Bonafide Dan Waktu	Nama Pakar & Jabatan	Judul / Sub Judul	Hasil Liputan/ Tulisan/ Pernyataan
Kompasiana.com 25 Juni 2015	Andre Purwanugraha, S.E., M.B.A dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Organisasi Nirlaba di Indonesia	Penyusun laporan keuangan memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan apalagi memang untuk diterapkan pada organisasi nirlaba yang mempunyai <i>scope</i> yang kecil dan biasanya sumberdayanya kurang. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan karena organisasi nirlaba dapat membuat laporan keuangan sederhana tanpa harus mengacu kepada standar pelaporan keuangan entitas nirlaba sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK 45).
Antikorupsi.org 26 Juli 2011	Anwar Nasution, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Aliran dana BI, ketua BPK diperiksa KPK	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution baru mengetahui penggunaan dana tersebut setelah menjabat sebagai Ketua BPK. Berdasarkan audit BPK yang disampaikan November 2006 lalu terjadi kejanggalan dalam kasus laporan keuangan pencairan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar 100 milyar rupiah pada tahun 2004 silam. 68,5 milyar dari dana itu digunakan untuk diseminasi dan bantuan hukum kasus BLBI. Beliau juga menambahkan perlunya organisasi mengimplementasikan psak 45 agar tidak terjadi kasus.
Kaltim post 24 Desember 2013	Pemerhati Lingkungan Semesta (PLS) dan Yayasan Pemuda Kutai Kartanegara (YPKK) Youth Foundation	Kasus hibah jalan di tempat kesannya tebang pilih anggota dewan pun curiga	Dalam APBD Kukar 2012 dialokasikan hibah lebih Rp 142,1 miliar dan mengalir kepada 428 lembaga/organisasi. Namun, hingga pemeriksaan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pertengahan 2013, laporan pertanggungjawaban hanya sekitar 100 lembaga/organisasi senilai Rp 56,2 miliar lebih, termasuk PLS dan YPKK. Sisanya sebesar Rp 85,9 miliar

Media Bonafide Dan Waktu	Nama Pakar & Jabatan	Judul / Sub Judul	Hasil Liputan/ Tulisan/ Pernyataan
			yang diterima 328 lembaga/organisasi tidak jelas. Sejumlah dana ditengarai fiktif karena tidak ada pertanggungjawaban. Belum termasuk dana bantuan sosial (bansos) yang juga mengucur pada 2012 sebesar Rp 89,8 miliar.

Sumber : Disarikan oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di beberapa organisasi di Indonesia masih banyak terdapat kecurangan seperti yang dilakukan di LSM di Provinsi Banten yang terduga memanipulasi laporan keuangan, juga yang terjadi di Yayasan Pemerhati Lingkungan Semesta (PLS) dan Yayasan Pemuda Kutai Kartanegara (YPKK) Youth Foundation yang diketahui setelah di periksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ternyata dalam laporan pertanggungjawaban berbeda dengan yang seharusnya, sehingga dari beberapa kasus diatas dapat ditarik kesimpulan masih terdapat yayasan yang tidak melaporkan informasi laporan keuangan secara jujur.

Informasi keuangan yang akurat, handal dan tepat waktu merupakan suatu hal yang selalu menjadi perhatian khusus dalam perusahaan maupun organisasi. Hal ini dapat mengukur akuntabilitas perusahaan dalam hal transparansi dan merupakan kewajiban manajemen untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian *intern* untuk memberikan jaminan yang wajar bagi para pemegang saham bahwa perusahaan dikendalikan dengan baik oleh manajemen. Pentingnya pengendalian *intern* dalam organisasi adalah sebagai sesuatu dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan objektif tertentu. Pengendalian *intern*

adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa *intern* (Zamzami, 2012:6).

Tujuan dari pengendalian *intern* pada studi (Amanina, 2011:4), yaitu menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi operasi perusahaan, membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi. Dewasa ini sering kita dengar dan jumpai hal-hal dalam perusahaan/organisasi yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan. Jika berbicara mengenai keuangan dalam perusahaan ataupun organisasi merupakan suatu hal sensitif yang penggunaannya bisa disalahartikan untuk kebutuhan personal karena berkaitan dengan aset likuid perusahaan yang mudah cair dan jika tidak ada sistem pengendalian internal yang memadai akan sangat merugikan perusahaan. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah tidak semua organisasi paham akan implementasi dari sistem pengendalian *intern* termasuk organisasi yang global dan besar sekalipun membuat lemahnya pengendalian *intern* pada organisasi. Terjadinya kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman manajemen yang tidak begitu dalam menyikapi adanya isu yang terjadi mengenai sistem pengendalian *intern*, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengkaji lebih jauh tentang penerapan sistem pengendalian *intern*. Penelitian oleh Kampo (2013:2) diperoleh hasil bahwa sebagian besar (73%) elemen-elemen pengendalian *intern* sudah dimiliki oleh yayasan, meskipun dalam

pelaksanaannya masih harus disempurnakan. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan sistem pengendalian *intern* yayasan dapat menjamin ketersediaan informasi keuangan yang akurat, andal, dan terutama dalam usaha melindungi asset yayasan secara aman. (Amanda, 2012)

Akuntansi dibutuhkan oleh yayasan untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pada yayasan itu sendiri. Organisasi nirlaba adalah organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk usaha-usaha yang bersifat sosial (Sumarni dan Soeprihanto, 1998:64). Dengan adanya organisasi nirlaba ini, maka disusunlah PSAK 45 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45) diatur mengenai bagaimana bentuk format dari laporan keuangan yang terdapat pada yayasan yang berisi mengenai laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Standar ini juga mengatur bagaimana model pencatatannya dan pelaporannya. (Rizky dan Padmono, 2013)

Berdasarkan PSAK 45 laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk satu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Walau pelaporan akuntansi mengenai entitas nirlaba telah jelas diatur dalam PSAK 45 tetap saja masih banyak organisasi nirlaba di Indonesia yang belum sanggup untuk melaksanakannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, keterbatasan sumber daya dan organisasi yang *scope* nya kecil menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan PSAK 45 belum banyak diterapkan.

Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian pengaruh penerapan psak 45 dan pengendalian *intern* terhadap kualitas informasi laporan keuangan (studi pada yayasan kota bandung), tidak mungkin rasanya kewajiban sebelum dan sesudah penerapan PSAK 45 tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan transparansi dan akuntabilitas yang baik termasuk didalamnya pencatatan fungsi akuntansi yang menjamin terlaksananya kualitas informasi penyajian laporan keuangan dan keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh yayasan maupun para donatur.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan oleh peneliti maka identifikasi masalahnya yaitu :

1. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Yayasan Di Kota Bandung
2. Bagaimana Pengaruh Pengendalian *Intern* Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Yayasan di Kota Bandung
3. Bagaimana Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Yayasan di Kota Bandung.



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Yayasan di Kota Bandung
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengendalian *Intern* Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Yayasan di Kota Bandung
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 dan Pengendalian *Intern* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Yayasan di Kota Bandung

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap agar setelah penelitian ini selesai dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, diantaranya :

1. Kegunaan Akademis
  - a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai tambahan referensi khususnya
  - b. Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian sidang Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
2. Kegunaan Operasional
  - a. Bagi Organisasi memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak pengelola

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sistematika penulisan dalam lima bab disusun sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN HIPOTESIS**

Menguraikan tentang referensi-referensi yang berkaitan dengan berbagai rumusan dalam penelitian ini yang selanjutnya menjadi acuan penulis dalam menganalisis masalah yang ada. Referensi yang dimaksud menyangkut definisi dan telaah atas penelitian yang telah ada dan selanjutnya membentuk kerangka pemikiran dan hipotesis penulis.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan perihal jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data serta metode analisis data yang dipakai.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan penulis berdasarkan metode penelitian yang dilakukan

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Memaparkan simpulan dari hasil penelitian, hambatan-hambatan pelaksanaan penelitian, serta saran-saran yang diberikan penulis kepada pihak yang terkait.